

Judul : Hari Ini Pansus RUU Pemilu Matangkan Pres-T dengan Pemerintah
Tanggal : Jumat, 14 Juli 2017
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 5

Hari Ini Pansus RUU Pemilu Matangkan Pres-T dengan Pemerintah

[JAKARTA] Rapat internal Pansus RUU Pemilu menyepakati 5 opsi paket yang akan dibawa untuk menyelesaikan 5 isu krusial dengan Pemerintah dalam pertemuan yang rencananya digelar hari ini, Kamis (13/7).

Kelima paket itu adalah sebagai berikut, paket pertama dengan *presidential threshold* (Pres-T) 20-25%; *parliamentary threshold* (PT) 4%, sistem pemilu terbuka, sebaran kursi dapil 3-10; dan metode konversi suara saint lague murni.

Paket kedua, isinya Pres-T 0%; PT 4%; sistem pemilu terbuka, sebaran 3-10 kursi perdapil; metode kuota hare.

Paket ketiga, Pres-T 10-15%; PT 4%, sistem pemilu terbuka; sebaran kursi 3-10; metode kuota hare.

Keempat, Pres-T 10-15%; PT 5%; sistem pemilu terbuka; sebaran kursi 3-8; metode saint lague murni.

Paket kelima, Pres-T 20-25%; PT 3,5%; sistem pemilu terbuka; sebaran kursi 3-10; metode kuota hare.



Lukman Edy

"Inilah alternatif yang akan diajukan," kata Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy, Rabu (12/7).

Kata dia, alternatif itu akan disampaikan dalam rapat dengan pemerintah. Apapun hasil rapat itu, akan dibawa ke rapat paripurna DPR 20 Juli mendatang untuk pengambilan keputusan.

"Jika pemerintah tidak dapat menyepakati salah satu opsi, maka kelima opsi tersebut akan dibawa

ke rapat paripurna, untuk diambil keputusan berdasarkan suara terbanyak," kata Lukman Edy.

Sementara itu, dalam pidato pembukaan Simposium Nasional dengan tema "*Perekonomian Indonesia dan Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945*," yang diadakan Majelis Perwakilan Rakyat (MPR), Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) menyentil anggota dewan dengan mengatakan bahwa pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu yang mandek sama saja tidak mengamalkan sila ke-4 Pancasila yang berbunyi "*kerakyataan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan*". "Kalau (revisi) UU Pemilu macet maka kita tidak laksanakan sila keempat (Pancasila)," kata JK, Rabu (12/7).

Dalam pandangannya, sila keempat Pancasila menekankan pada musyawarah mufakat. Atas dasar itu, jika musyawarah tidak tercapai maka sama saja tidak menjalankan sila keempat. Meskipun,

ia mengatakan bahwa pengambilan keputusan dengan suara terbanyak atau voting juga bagian dari pada demokrasi.

"Dasarnya musyawarah tapi juga ada tata tertib (DPR) kalau memang musyawarah tidak bisa dicapai, ya suara terbanyak. Suara terbanyak juga demokratis," ungkapnya.

Oleh karena itu, JK menyarankan agar pemerintah dan DPR menja-

lankan dahulu musyawarah dalam pembahasan revisi UU Pemilu. Kemudian, voting jika memang tidak dicapai kata mufakat.

Lebih lanjut, JK menekankan bahwa pemerintah tetap dalam posisi mempertahankan *presidential threshold* (Pres-t) tetap 20% sesuai dengan aturan dalam dua kali pemilihan presiden (pilpres) tahun 2009 dan 2014. [MJS/N-8]

Paket Alternatif RUU Penyelenggaraan Pemilu

	A	B	C	D	E
Presidential threshold (Pres-T)	20-25%	0%	10-15%	10-15%	20-25%
Parliamentary threshold (PT)	4%	4%	4%	5%	3,5%
Sistem pemilu	terbuka	terbuka	terbuka	terbuka	terbuka
Sebaran kursi dapil	3-10	3-10	3-10	3-8	3-10
Metode konversi suara	saint lague murni	kuota hare	kuota hare	saint lague murni	kuota hare